



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)  
TAHUN 2015**

**BADAN KOORDINASI WILAYAH III  
PROVINSI JAWA TENGAH**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Gambaran Umum.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan..... Organisasi.	2
D. Visi dan Misi Bakorwil III.....	5
<b>BAB II : PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>15</b>
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	17
B. Realisasi Anggaran .....	21
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja.....	23
B. Strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.....	24

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Hidayah-Nya, kami telah selesai menyusun **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) TAHUN 2015** sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Koordinasi Wilayah III Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini merupakan laporan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Koordinasi Wilayah III Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kinerjanya.

Akhirnya semoga LKj IP ini bermanfaat untuk lebih mendorong peningkatan kinerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Purwokerto, Februari 2016

**KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH III  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**AGUS UTOMO, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600825 198103 1 006

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum

Paradigma baru tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam berbagai aspek dan dimensi, telah mendorong upaya penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Koordinasi Wilayah III Provinsi Jawa Tengah. dengan melakukan pengukuran kinerja, evaluasi dan pengungkapan (*disclosure*) yang memadai dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### 1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Koordinasi Wilayah III Provinsi Jawa Tengah.

#### 2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- a. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Gubernur Jawa Tengah atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Koordinasi Wilayah III Provinsi Jawa Tengah.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Koordinasi Wilayah III Provinsi Jawa Tengah. untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Dasar Hukum.....

## **B. Dasar Hukum**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 Badan Koordinasi Wilayah III Provinsi Jawa Tengah. disusun berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **C. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi**

### **1. Kedudukan**

Kedudukan BAKORWIL dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai unsur Pemerintah Daerah di bidang koordinasi pembangunan lintas Kabupaten/Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Adapun BAKORWIL III memiliki wilayah koordinasi yang meliputi 9 (sembilan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota yaitu Kabupaten : Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Pekalongan, Tegal, Pemalang, Brebes, Batang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal.

Dasar Hukum...

Dasar hukum pembentukan BAKORWIL adalah :

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 100 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

## **2. Tugas Pokok Dan Fungsi**

### **a. Tugas Pokok :**

Membantu Gubernur di bidang koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di Daerah.

### **b. Fungsi :**

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di Daerah;
- 2) Penyusunan rencana dan program di koordinasi, pembinaan dan pengawasan;
- 3) koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di Daerah meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah;
- 5) Pelaksanaan Kesekretariatan Badan;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Susunan organisasi....

### **c. Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi BAKORWIL III sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pemerintahan membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
  - 2) Sub Bidang Pemerintahan Umum.
4. Bidang Pembangunan, membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Ekonomi;
  - 2) Sub Bidang Prasarana.
5. Bidang Kemasyarakatan, membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Kesejahteraan Umum;
  - 2) Sub Bidang Sosial Budaya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan ketrampilannya.

D. Visi dan Misi...

## **D. Visi dan Misi Badan Koordinasi Wilayah III**

### **1. Visi**

**“Terwujudnya Bakorwil Sebagai Ujung Tombak Sinergitas dan Pengembangan Antar Kabupaten/Kota Wilayah III Untuk Mendukung Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”.**

#### **Penjelasan/Makna Visi**

##### **Ujung tombak :**

Bakorwil sebagai SKPD Provinsi Jawa Tengah di daerah, berperan menjadi motor penggerak upaya penurunan kesenjangan antar wilayah melalui koordinasi dan fasilitasi dalam rangka sinergitas program pembangunan lintas Kabupaten/Kota.

##### **Sinergis dan Berkembang:**

Kondisi yang menggambarkan adanya sinergitas program pembangunan lintas Kabupaten/Kota yang selaras, terpadu dan berkesinambungan untuk maju dan berkembang bersama-sama di Wilayah III Provinsi Jawa Tengah.

### **2. Misi**

1) Mewujudkan hubungan kerjasama yang baik antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Bakorwil III Provinsi Jawa Tengah, antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan dengan Lembaga-lembaga yang lain.

2) Mewujudkan...

- 2) Mewujudkan sinkronisasi program-program pembangunan antar Kabupaten/Kota untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan antar Kabupaten/Kota di Bakorwil III.
- 3) Mendorong terwujudnya kemandirian daerah melalui upaya-upaya pemberdayaan daerah dengan mengembangkan potensi secara bersama antara lain produk-produk unggulan, seni budaya dan pariwisata di Kabupaten/Kota se Wilayah Bakorwil III Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Meningkatkan kinerja pelayanan publik yang profesional di Bakorwil III.

#### **Penjelasan/Makna masing-masing Misi**

**Misi 1)** Hubungan kerjasama yang baik adalah Hubungan Inter relasional yang saling menguntungkan untuk tujuan bersama.

**Misi 2)** Sinkronisasi program-program pembangunan adalah sikap saling menyesuaikan dan saling menghargai kepentingan pembangunan antar daerah agar tidak terjadi friksi atau konflik kepentingan antar daerah.

**Misi 3)** Kemandirian daerah adalah kondisi ideal suatu daerah yang ditandai dengan kemampuan untuk mengatur dan mengurus (mencukupi kebutuhan) rumah tangga daerah sendiri secara optimal dengan berbasis sumber daya daerah.

**Misi 4)** Pelayanan publik yang profesional adalah upaya Bakorwil III Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan pelayanan kepada stakeholder dan masyarakat secara cepat dan tepat.

## **E. Tujuan dan Sasaran**

### **1. Tujuan**

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh Badan Koordinasi Wilayah III Provinsi Jawa Tengah yaitu :

- 1) Mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah.
- 2) Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi pembangunan daerah Kabupaten / Kota dengan Lembaga-lembaga lain.
- 3) Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan tanggap darurat bencana.

### **2. Sasaran**

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu mendatang adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kabupaten/Kota di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, dengan indikator sbb :

- Indeks Williamson
- Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Mediasi bidang Pemerintahan
- Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Mediasi bidang Pembangunan
- Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Mediasi bidang Kemasyarakatan
- Jumlah Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah

2)Meningkatkan...

- 2) Meningkatkan sinergitas kebijakan pembangunan terhadap peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, dengan indikator sbb :
  - Jumlah Kab/Kota yang telah melaksanakan kebijakan pembangunan terhadap peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
- 3) Meningkatnya sinergitas penanganan Bencana di Kab/Kota, dengan indikator sebagai berikut :
  - Jumlah fasilitasi penanganan bencana

## **F. Lingkungan Strategis**

### **1. Keadaan Geografi**

BAKORWIL III memiliki luas wilayah 1.056.735 Ha dengan penduduk sejumlah 11.636.150 jiwa, dan kepadatan penduduk 1.1001,14 jiwa/km<sup>2</sup>. Secara administratif BAKORWIL III meliputi 11 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 9 Daerah Kabupaten dan 2 Daerah Kota, 180 Kecamatan, 2.355 Desa dan 163 Kelurahan.

### **2. Sumber Daya Bakorwil III**

#### **a. Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan data yang ada jumlah pegawai BAKORWIL III pada Tahun 2014 sejumlah 58 orang, yang terdiri :

#### **Berdasarkan kepangkatan :**

- Golongan IV : 5 Orang
- Golongan III : 29 Orang
- Golongan II : 20 Orang

- Golongan I : 4 Orang
- Honor : 2 Orang

**Berdasarkan Eselon :**

- Eselon II : 1 Orang
- Eselon III : 4 Orang
- Eselon IV : 8 Orang

**Berdasarkan Pendidikan Formal :**

- Tamat S2 : 2 Orang
- Tamat S1 : 14 Orang
- Tamat D3 : 7 Orang
- Tamat SLTA : 28 Orang
- Tamat SLTP : 2 Orang
- Tamat SD : 5 Orang

**b. Sarana/Prasarana**

Sarana Perkantoran BAKORWIL III menempati 2 (dua) Kantor yaitu di Purwokerto dan Pekalongan.

Sarana dan prasarana BAKORWIL III terdiri dari :

Tabel 1 Jumlah Sarana dan Prasarana....

Tabel 1  
Jumlah Sarana dan Prasarana

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1	Komputer	14	Unit
2	Mesin Ketik	2	Unit
3	Kalkulator	-	Unit
4	AC	24	Unit
5	Televisi	7	Unit
6	Faksimile	2	Unit
7	Telepon (internal & eksternal)	3	Unit
8	Sound System	3	Unit
9	LCD	5	Unit
10	LAN ( <i>Lokal Net Working</i> )	1	Unit
11	Internet	1	Jaringan
12	OHP	5	Unit
13	Rak Besi	20	Unit
14	Almari Besi	4	Unit
15	Filling Cabinet	22	Unit
16	Kendaraan Roda 4	16	Unit
17	Kendaraan Roda 2	10	Unit
18	Ruang Rapat	4	Ruang
19	Laptop	19	Unit

### 3. Wilayah Kerja

Wilayah kerja BAKORWIL III meliputi 9 Kabupaten dan 2 Kota terdiri dari :

- 1) Kabupaten Banyumas
- 2) Kabupaten Cilacap
- 3) Kabupaten Purbalingga
- 4) Kabupaten Banjarnegara
- 5) Kabupaten Batang
- 6) Kabupaten Pekalongan

- 7) Kabupaten Pemalang
- 8) Kabupaten Tegal
- 9) Kabupaten Brebes
- 10) Kota Tegal
- 11) Kota Pekalongan

## **G. Peran Strategis Bakorwil III**

Kepala Bakorwil III berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur di bidang pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di Daerah, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Secara kewilayahan, Bakorwil III Provinsi Jawa Tengah memiliki wilayah kerja meliputi 9 Kabupaten dan 2 Kota terdiri dari Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Tegal dan Kota Pekalongan. Dari sisi tersebut, maka Bakorwil III Provinsi Jawa Tengah memiliki peran yang strategis, meliputi:

### **1. Letak Bakorwil strategis karena dekat dengan Wilayah Kabupaten/ Kota.**

Dengan adanya posisi atau letak yang dekat dengan Wilayah Kabupaten/Kota, maka Bakorwil III Provinsi Jawa Tengah memiliki berbagai kelebihan antara lain :

- a. Mempermudah...

- a. Mempermudah koordinasi dengan SKPD dan stakeholder Kabupaten/ Kota, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi membantu tugas-tugas Gubernur Jawa Tengah dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah dan pelaksanaan urusan pemerintahan lebih optimal.

Pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut antara lain melakukan Pembinaan Wilayah dalam arti luas meliputi :

- 1) Proses pengintegrasian berbagai nilai sosial kultural yang terdapat di Kabupaten/Kota;
  - 2) Proses untuk menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi, dan budaya di Kabupaten/Kota;
  - 3) Mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah pemerintahan sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat;
  - 4) Membangun manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia dalam kerangka satu bangsa yaitu bangsa Indonesia
- a. Mempermudah koordinasi dan fasilitasi berbagai permasalahan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten/Kota, sebagai upaya mengeliminir potensi konflik antar daerah dan untuk mewujudkan iklim pembangunan daerah yang kondusif;
  - b. Mempermudah koordinasi, fasilitasi dan mediasi Kabupaten/Kota untuk mendukung program dan capaian target RPJMD Provinsi Jawa Tengah, khususnya terhadap target-target RPJMD yang merupakan..

akumulasi capaian hasil dari Kabupaten/Kota yang perlu dilakukan fasilitasi, koordinasi, dorongan dan dukungan secara intensif sehingga target RPJMD tersebut secara regional dapat tercapai.

- c. Mempermudah koordinasi dan fasilitasi berbagai program prioritas dan program unggulan Kabupaten/Kota guna memperoleh dukungan dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat, sebagai upaya meningkatkan kebersamaan dan keterpaduan pembangunan serta pengembangan dan penawaran produk-produk unggulan daerah termasuk didalamnya upaya pengembangan dan pelestarian seni budaya daerah;
- d. Mempermudah fasilitasi peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten/Kota.

## **2. Memiliki hubungan emosional dan kedekatan dengan Kabupaten/ Kota.**

Dengan intensitas koordinasi yang tinggi dengan SKPD dan stakeholder Kabupaten/Kota, maka Bakorwil III Provinsi Jawa Tengah memiliki hubungan kedekatan dengan Kabupaten/Kota. Hal ini akan membantu mempermudah pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, disamping fungsi-fungsi lain yang bersifat penunjang dan perumusan kebijakan teknis.

H. Permasalahan...

## H. Permasalahan

Adapun permasalahan utama Badan Koordinasi Wilayah III yang harus diselesaikan dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Belum optimalnya koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
2. Belum optimalnya komitmen Kabupaten/Kota dalam mendukung program-program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Luasnya wilayah koordinasi BAKORWIL Wilayah III, yang meliputi 2 wilayah Eks Karesidenan, yaitu Eks Karesidenan Banyumas dengan 4 Kabupaten dan Eks Karesidenan Pekalongan dengan 7 Kabupaten dan 2 Kota, yang dalam hal ini berpengaruh terhadap rentang kendali ideal wilayah koordinasi.
4. Perangkat Daerah yang ada belum memanfaatkan BAKORWIL sebagai mitra kerja dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

## **BAB II**

### **PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Koordinasi Wilayah III pada Tahun 2015 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Koordinasi Wilayah III pada Tahun Anggaran 2015 telah melaksanakan 8 program 32 kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar **Rp. 14.249.052.000,-** terdiri dari :

- a. Belanja Langsung, sebesar Rp. 6.415.219.000,-
- b. Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp. 7.833.833.000,-

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Koordinasi Wilayah III dengan Gubernur Tahun 2014, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1 .

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 2  
**Skala Pengukuran Kinerja**  
**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

<b>NO</b>	<b>SKALA CAPAIAN KINERJA</b>	<b>KATEGORI</b>
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2015, Bakorwil III telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Bakorwil III Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dan Rencana Strategis Bakorwil III, setidaknya terdapat 3 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu:

- a. Sasaran 1** : Meningkatnya koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kabupaten/Kota di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kabupaten/Kota di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	1. Indeks Williamson	0,7015	0,6954	100,88	-	100,76
	2. Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Mediasi bidang Pemerintahan	10 rakor	10 rakor	100	100	29
	3. Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Mediasi bidang Pembangunan	29 rakor	29 rakor	100	100	21
	4. Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Mediasi bidang Kemasyarakatan	11 rakor	11 rakor	100	100	21

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya koordinasi, pembinaan dan pengawasan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dapat....

dapat dicapai sesuai dengan target. Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1.1, rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, sama yaitu 100%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk sasaran 1.1, adalah sebesar Rp. 1.581.617.352,- atau 99,56 % dari total pagu sebesar Rp.1.589.080.000,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,44 % dari pagu yang ditentukan.

Analisis program / kegiatan yang menunjukkan keberhasilan pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan kegiatan antara lain adalah :

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Mediasi Lintas Kab/Kota Bidang Pemerintahan
- 2) Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Mediasi Lintas Kab/Kota Bidang Pembangunan
- 3) Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Mediasi Lintas Kab/Kota Bidang Kemasyarakatan

**b. Sasaran 2.** Meningkatkan sinergitas kebijakan pembangunan terhadap peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 231.010.000,- dapat terealisasi Rp. 227.753.900,- atau 98,67 %,.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
Meningkatkan sinergitas kebijakan pembangunan terhadap peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Jumlah Kab/Kota yang telah melaksanakan kebijakan pembangunan terhadap peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100	100	100

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya sinergitas kebijakan pembangunan terhadap peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya program Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak dengan kegiatan antara lain adalah :

- 1) Kegiatan Rakor Pengarusutamaan Gender ( PUG )
- 2) Kegiatan Rakor Pengarusutamaan Hak Anak ( PUHA )
- 3) Kegiatan Rakor Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
- 4) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat dalam penanganan anak berkebutuhan khusus.

**c. Sasaran 3** Meningkatnya sinergitas penanganan Bencana di Kab/Kota.dengan anggaran sebesar Rp. 599.672.000,- dapat terealisasi 503.373.500,- atau 83,94 %.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
Meningkatnya sinergitas penanganan Bencana di Kab/Kota.	Jumlah fasilitas penanganan bencana	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100	100	

Keberhasilan meningkatnya sinergitas penanganan bencana di Kabupaten/Kota didukung oleh Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan kegiatan Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.

- Kegiatan kebencanaan yang ada di Bakorwil tersebut diharapkan dapat mempercepat kehadiran Pemerintah Provinsi di lokasi bencana atau Bakorwil III sebagai P3B (Penanggulangan Pertama Pada Bencana) pada saat adanya bencana di daerah.
- Pada tahun anggaran 2015 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 599.672.000,- dengan target penyaluran air bersih 1.350 tanki, sudah terealisasi 1.350. tangki atau 6.750.000 liter. Selain itu Bakorwil III diminta membantu proses distribusi bantuan bencana alam yang berasal dari BPBD Provinsi Jawa Tengah ke 7 Kabupaten (9 lokasi bencana).

## B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakorwil III Provinsi Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2015, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 14.249.052.000,-, terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.833.833.000,- dan Belanja Langsung Rp. 6.415.219.000,-

Anggaran tersebut bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 431.460.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 5.405.287.000,-
3. Belanja Modal, sebesar Rp. 578.472.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

<b>Sasaran</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Realisasi</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
Meningkatnya koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kabupaten/Kota di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	1.589.080.000	1.581.617.352	99,56
Meningkatkan sinergitas kebijakan pembangunan terhadap peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	231.010.000	227.753.900	98,67
Meningkatnya sinergitas penanganan Bencana di Kab/Kota.	Penyelenggaran Penanggulangan Bencana	599.672.000	503.373.500	83,94

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2015, apabila dibandingkan Tahun 2014 maka terjadi penurunan sebesar 1,20%, Tahun 2015 sebesar 94,06 %, Tahun 2014 sebesar 95,26 %.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja Bakorwil III

Bakorwil III Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur di bidang koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di Daerah mempunyai fungsi untuk

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di Daerah;
- 2) Penyusunan rencana dan program di koordinasi, pembinaan dan pengawasan;
- 3) koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di Daerah meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah;
- 5) Pelaksanaan Kesekretariatan Badan; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Badan Koordinasi Wilayah III Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori **BAIK**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai ( 94,06 %), dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kabupaten/Kota di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dapat dicapai 99,56 %
2. Sasaran meningkatkan sinergitas kebijakan pembangunan terhadap peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak tercapai 98,67 %.
3. Sasaran meningkatnya sinergitas penanganan Bencana di Kab/Kota dapat tercapai 83,94 %.

## **B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Koordinasi Wilayah III Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Mengoptimalkan penyusunan perencanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
3. Meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program-program penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Demikian...

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 Badan Koordinasi Wilayah III Provinsi Jawa Tengah kami susun sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja di masa-masa yang akan datang.

Purwokerto, Februari 2016

**KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH III  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**AGUS UTOMO, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600825 198103 1 006